

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2016-2017
(Studi Empiris Pada Satker Di Jajaran Kantor Kemenag Kab. Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)**

**Oleh :
LIYA AMANATUNNAAFISAH
NIM. 1423203054**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

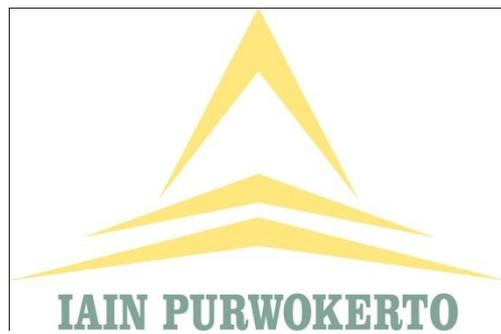
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kajian Pustaka.....	14
1. Kualitas Laporan Keuangan.....	14
2. Penerapan SAP Berbasis Akrua.....	20
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	24
4. Hubungan Pengaruh Antar Variabel.....	28

5. Penelitian Terdahulu	30
B. Kerangka Pemikiran.....	34
C. Rumusan Hipotesis	34
D. Landasan Teologis	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	38
1. Populasi.....	38
2. Sampel	39
3. Teknik Pengambilan Sampel	39
D. Variabel dan Indikator Penelitian.....	40
1. Variabel Penelitian	40
2. Indikator Penelitian	40
E. Pengumpulan Data Penelitian	42
1. Subjek dan Objek Penelitian	42
2. Jenis dan Sumber Data	42
3. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Alat Uji Kualitas Data.....	44
1. Uji Validitas	44
2. Uji Reliabilitas.....	44
G. Alat Uji Asumsi Klasik	45
1. Uji Multikolonieritas	45
2. Uji Normalitas	45
3. Uji Heteroskedastisitas.....	46
4. Uji Autokorelasi	46
H. Alat Uji Hipotesis.....	46
1. Koefisien Determinasi (R^2).....	46
2. Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	47
3. Analisis Regresi Linier Berganda	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas	48
1. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas	48
2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas	50
3. Jumlah Pegawai Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas	51
B. Karakteristik Profil Responden	51
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	52
3. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja Sebagai PNS	52
C. Hasil Uji Instrumen Penelitian	53
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif	53
2. Hasil Uji Kualitas Data	54
a. Hasil Uji Validitas	54
b. Hasil Uji Reliabilitas	56
3. Hasil Uji Asumsi Klasik	57
a. Hasil Uji Multikolonieritas	57
b. Hasil Uji Normalitas	57
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
d. Hasil Uji Autokorelasi	59
4. Hasil Uji Hipotesis	60
a. Koefisien Determinasi (R^2)	60
b. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	61
c. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	61
D. Pembahasan	63
1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan	63
2. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	64
3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	65

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja satuan kerja agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik, maka dari itu pemerintah diharuskan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.¹

Akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi atas aktivitas dalam menjaga keakuratan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pemerintah wajib merespon tuntutan akuntabilitas tersebut. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik.²

Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah di dalam Surah Al-Anfal ayat 27 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Didukung oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Abu Hurairah r.a yang menjelaskan wajibnya menunaikan amanah kepada pemiliknya :

¹ Mahmudah Lubis, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akrual, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara*, Tesis, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018).

² Mohamad Mahsun, dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : BPFE, 2007), hlm. 69.

³ QS. Al-Anfal Ayat 27.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya (untuk menunaikan amanah kepadanya), dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud : 3/290 No. 3535)

Kandungan ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin, agar mereka senantiasa menjaga amanah yang telah diamanahkan kepada mereka berupa sifat taqwa. Firman Allah SWT dalam ayat dan hadis tersebut mencakup pengertian amanah dalam arti yang lebih luas yang pada dasarnya harus diterapkan disemua sektor kehidupan, seperti jual-beli (muamalah), kepemimpinan, transaksi keuangan, pengelolaan keuangan publik dan lain-lain. Dalam hal pengelolaan keuangan publik, implementasi ayat tersebut berupa sikap amanah/tanggungjawab (akuntabilitas) dan keterbukaan (transparansi) kepada publik terhadap sistem pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan kementerian agama (LKKA). Dengan berdasar pada ayat tersebut, lembaga pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan kepada publik tentang bagaimana pengelolaan keuangan di pemerintah pusat maupun di daerah.⁴

Sejak 22 Oktober 2010, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 menandai berakhirnya era PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai hal yang sama. PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan hasil kerja keras Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari 10 pasal, dan 2 (dua) lampiran. Lampiran I menguraikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang akan ditetapkan paling lambat 4 (empat) tahun semenjak PP Nomor 71 Tahun 2010 ini ditetapkan. Hal ini

⁴ Rashwan Zuhudy Rafid, *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Bone)*, Skripsi, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama paling lambat mulai tahun anggaran 2015.⁵

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP Berbasis Akrual akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan SAP akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah yang lebih baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik.⁶

Informasi keuangan harus dapat digunakan untuk kepentingan eksternal maupun internal. Untuk memenuhi kepentingan eksternal, informasi keuangan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan untuk kepentingan internal, informasi keuangan harus dapat digunakan untuk tujuan manajerial, antara lain untuk analisa, penilaian kinerja, dan pengambilan keputusan. Penyajian informasi secara akrual akan lebih mendukung pemanfaatan informasi keuangan untuk kepentingan manajerial tersebut.⁷

Selain penerapan SAP Berbasis Akrual, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008

⁵ Mahmudah Lubis, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akrual, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara*, Tesis, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018).

⁶ Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13, April 2008.

⁷ “Bupati Banyumas : Penerapan SAP Akrual Perlu Keyakinan, Komitmen dan Kerja Tim”, <https://monitor.co.id>, diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.59.

tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan sistem integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk bertanggungjawab dan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.⁸

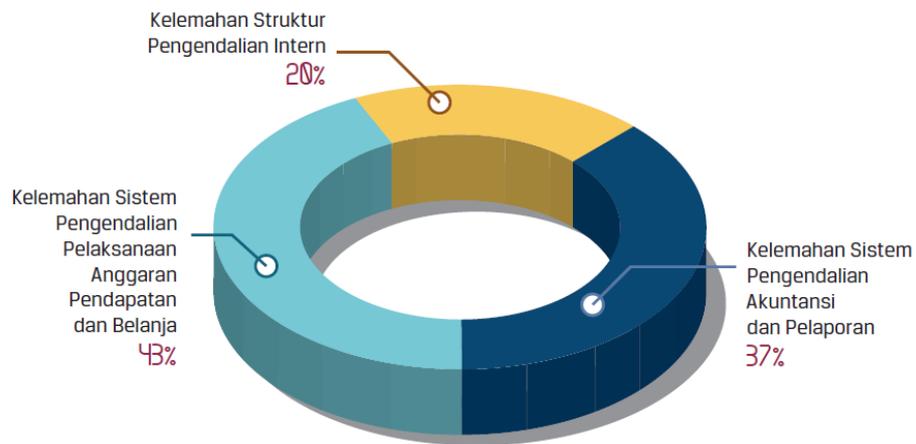
Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPIP yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPIP telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPIP dikelompokkan atas tiga kategori berikut : (1) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan artinya kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja artinya kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa; (3) kelemahan struktur pengendalian intern artinya kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.⁹

Berikut grafik komposisi permasalahan kelemahan SPI atas pemeriksaan LKKL tahun 2016 :

⁸ Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 257.

⁹ Mahmudah Lubis, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akrua, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara*, Tesis, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018).

Gambar 1.1
Komposisi Permasalahan Kelemahan SPIP Atas Pemeriksaan LKKL
Tahun 2016



Sumber : <https://www.bpk.go.id/ihps>¹⁰

Salah satu Kementerian/Lembaga Pemerintah yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang bertujuan untuk penyusunan laporan keuangan yang berkualitas adalah Kementerian Agama. Kemenag adalah kementerian yang memiliki satuan kerja terbanyak hingga mencapai tidak kurang dari 4.557 satuan kerja. Sehingga, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 membuat kemenag harus bekerja keras membenahi seluruh laporan keuangan. Selain koordinasi pusat dan daerah diperkuat dan diintensifkan, Kemenag juga mengangkat duta-duta akrual di seluruh satuan kerja, serta melakukan sejumlah upaya implementatif lainnya.¹¹

Pada Kementerian Agama, terdapat 4 kriteria Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) dalam pemberian opini BPK atas laporan keuangan untuk memperoleh opini terbaik. Pertama, apakah LKKA tersebut disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan atau tidak. Kedua, kecukupan pengungkapan, apakah seluruh transaksi diungkap dalam laporan

¹⁰ "BPK RI, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*", <https://www.bpk.go.id>, diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.29.

¹¹ "Kementerian Agama Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan Tahun 2016", <https://kemenag.go.id>, diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.59.

keuangan. Ketiga, bagaimana tingkat kepatuhan Kemenag terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola keuangan. Keempat, bagaimana sistem pengendalian internal di Kemenag kuat atau tidak.¹²

Berikut daftar tabel opini BPK atas LKKL Tahun 2012-2016 :

Tabel 1.1
Daftar Opini BPK atas LKKL Tahun 2012-2016

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	006	Kejaksaan Republik Indonesia	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP	WTP
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
8	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
9	012	Kementerian Pertahanan	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
11	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	018	Kementerian Pertanian	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP
13	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
15	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	024	Kementerian Kesehatan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	025	Kementerian Agama	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP

Sumber : <https://www.bpk.go.id/ihps>¹³

Berdasarkan tabel tersebut, dapat menunjukkan bahwa hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) dari tahun 2012-2014 berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), akan tetapi hasil pemeriksaan LKKA tahun 2015 menurun menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini juga terjadi pada laporan keuangan Kementerian Agama Kab. Banyumas yang mengalami penurunan kualitas laporan keuangan dikarenakan mengalami kendala-kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Penyebab utama

¹² Siti Rahmayani, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Rekonsiliasi Data Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Kementerian Agama Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi*, Tesis, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018).

¹³ "BPK RI, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*", <https://www.bpk.go.id>, diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.29.

menurunnya opini hasil audit BPK terhadap LKKA Tahun 2015 dan beberapa kendala-kendala penyusunan LKKA antara lain : 1) SDM penyusun Laporan Keuangan pada tingkat satker dan wilayah belum memadai, ditandai dengan banyak pegawai pada bagian akuntansi/keuangan yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi. 2) disamping itu, sarana dan kemahiran menggunakan TI berupa komputer masih kurang dari segi jumlah dan kualitas. 3) penyajian Laporan Keuangan yang belum sesuai dengan SAP. 4) dan pengawasan keuangan yang lemah dan adanya ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2017 kualitas LKKA tahun 2016 menunjukkan kenaikan opini WTP dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan kementerian agama. Perbaikan sistem pengelolaan penyusunan laporan keuangan juga dilakukan pada Kementerian Agama Kab. Banyumas sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Walau demikian, BPK juga masih menemukan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang tidak sesuai ketentuan antara lain terdapat kesalahan pengklasifikasian akun yang berpengaruh terhadap pengakuan dan penyajian laporan keuangan dan perbedaan saldo asset tetap antara Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan SIMAK BMN yang belum dapat ditelusuri.¹⁴

Satker Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dipilih sebagai lokasi penelitian karena Satker Kemenag Kab. Banyumas telah meraih 3 Penghargaan dari KPPN Purwokerto. 3 Penghargaan Terbaik antara lain Pertama kategori ketepatan dan keakuratan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016, kategori Pengelolaan/Penyerapan Dana DIPA Tahun Anggaran 2016 dengan Pagu Satker Diatas 5 Milyar, dan

¹⁴ “BPK RI, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*”, <https://www.bpk.go.id>, diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.29.

kategori Ketepatan dan Akurasi Rencana Penarikan Dana Satuan Kerja Tahun Anggaran 2016.¹⁵

Tabel 1.2
Laporan Neraca Kas Kementerian Agama Kab. Banyumas Tahun 2016

NERACA PERCOBAAN		Kode Laporan: NPSAKT	
TINGKAT SATUAN KERJA		Tanggal : 14-01-19	
PER 31 DESEMBER 2016		Halaman : 2	
(DALAM RUPIAH)			
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	: 026	KEMENTERIAN AGAMA	
ESEKELON I	: 01	SEKRETARIAT JENDERAL	
WILAYAH/PROPINSI	: 0900	JAWA TENGAH	
SATUAN KERJA	: 417420	KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS (SETJEN)	

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,330	
3	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		89
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	98,258,580	
3	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29,723,944	
3	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	23,400,000	
3	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	43,298,000	
3	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS		426,000
3	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12,869,305	
3	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	79,879,260	
3	511129	Belanja Uang Makan PNS	277,873,604	
3	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	62,390,000	
3	512211	Belanja Uang Lembur	16,508,000	
3	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,122,236,928	
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	87,588,950	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,799,500	
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	58,995,000	
3	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		245,000
3	521211	Belanja Bahan	46,093,530	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,700,000	
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40,000,000	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34,739,515	
3	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukal, Meteral dan Leges	2,196,000	
3	522111	Belanja Langganan Listrik	77,588,528	
3	522112	Belanja Langganan Telepon	7,845,041	
3	522113	Belanja Langganan Air	14,585,932	
3	522151	Belanja Jasa Profesi	8,400,000	
3	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	216,847,000	
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115,885,870	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	61,522,280	
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,150,000	
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49,540,000	
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17,230,000	
		J U M L A H	4,184,110,438	4,184,110,438

Dalam laporan neraca diatas, pengakuan biaya/belanja dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain,

¹⁵ “Kemenag Banyumas Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan”, <https://jateng2.kemenag.go.id>, diakses Rabu 4 Juli 2018 pukul 10.10.

pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga. Kelemahan pada basis kas ini belum memberikan informasi kinerja secara utuh karena hanya memuat informasi kas masuk dan kas keluar, serta belum memotret pelaporan posisi asset, utang, ekuitas.

Tabel 1.3
Laporan Keuangan Neraca Akrual Kemenag Kab. Banyumas Tahun 2016-2017

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 025		KEMENTERIAN AGAMA		Kode Laporan: 65A2517
UNIT ORGANISASI : 01		SEKRETARIAT JENDERAL		Tanggal : 05/02/18
WILAYAH/PROVINSI : 0300		JAWA TENGAH		Halaman : 1
SATUAN KERJA : 417429		KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS (SETJEN)		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
NAMA PERKORAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	248.920	0	248.920	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	0	0	0,00
Piutang Bukan Pajak (Neto)	248.920	0	248.920	0,00
Persediaan	27.371.900	18.519.050	8.852.850	47,80
JUMLAH ASET LANCAR	27.620.820	18.519.050	9.101.470	49,54
ASET TETAP				
Tanah	45.596.814,000	10.109.783,000	35.448.831,000	350,81
Peralatan dan Mesin	1.483.216,609	1.488.098,609	15.117,000	1,02
Gedung dan Bangunan	11.082.809,000	5.649.338,950	5.433.470,050	99,17
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	60.380,000	(60.380,000)	(100,00)
Aset Tetap Lainnya	1.578,000	1.578,000	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.527.832,378)	(2.197.960,228)	670.127,850	(30,17)
JUMLAH ASET TETAP	56.594.385,233	15.197.161,335	41.489.223,898	274,83
ASET LAINNYA				
Awal Lain-lain	99.255,000	336.031,000	(236.776,000)	(81,48)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(99.255,000)	(196.843,610)	97.588,610	(49,29)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	340.437,390	(340.437,390)	(100,00)
JUMLAH ASET	86.624,985,783	35.466.117,773	51.158.868,010	289,11
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	14.847.784	48.289,755	(31.341,971)	(67,70)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.847.784	48.289,755	(31.341,971)	(67,70)
JUMLAH KEWAJIBAN	14.847.784	48.289,755	(31.341,971)	(67,70)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	56.609,057,999	15.419,828,018	41.189.229,981	257,11
JUMLAH EKUITAS	56.609,057,999	15.419,828,018	41.189,229,981	257,11

Dalam laporan neraca dengan basis akrual diatas, lebih menunjukkan realitas (ekonomi/keuangan) yang ada, bahwa organisasi menikmati hasil pemeliharaan gedung meskipun belum terbayar, makanya dapat mengakui

utang dan beban, beban ini menyebabkan ekuitas (modal) menjadi berkurang. Realitas ekonomi inilah yang ditangkap dalam basis akrual sehingga pelaporan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, dan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh penerapan SAP Berbasis Akrual dan SPIP pada Laporan Keuangan karena penerapan SAP Berbasis Akrual memberikan manfaat informasi yang lebih transparan dan akuntabel mengenai sumber daya, kondisi keuangan, biaya layanan pemerintahan, dan yang lebih penting meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bagi pengguna internal maupun eksternal. Sementara akuntansi berbasis kas hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang. Adapun penerapan SPIP wajib dilaksanakan pada setiap organisasi pemerintahan. Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas kinerja pemerintahan secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2016-2017 (Studi Empiris Pada Satker Di Jajaran Kantor Kemenag Kab. Banyumas)

B. Definisi Operasional

1. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial

berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.¹⁶

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁷

3. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan diambil bisa lebih berkualitas.¹⁸

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi standar akuntansi berlaku umum. Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu : Relevan, Andal, Dapat Dipahami, Dapat Dibandingkan.¹⁹

IAIN PURWOKERTO

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan periode 2016-2017 pada Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas?

¹⁶ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah”, <http://www.djpk.depkeu.go.id>, diakses 31 Mei 2018 pukul 10.19.

¹⁷ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”, <http://www.bpkp.go.id>, diakses 31 Mei 2018 pukul 11.10.

¹⁸ Dewi Andini dan Yusrawati, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)*, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol 24 No 1 Universitas Islam Riau, 2015.

¹⁹ Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi Pemerintahan Daerah : Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 11-12.

2. Apakah terdapat pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan periode 2016-2017 pada Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas?
3. Apakah secara simultan terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan periode 2016-2017 pada Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut akan dijelaskan mengenai tujuan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan periode 2016-2017 pada Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan periode 2016-2017 pada Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan periode 2016-2017 pada Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya dan pengetahuan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, memberikan wawasan serta wacana kepada pihak satuan kerja di jajaran kantor kemenag dalam mengembangkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat deskripsi tentang variabel penelitian, cara penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang dipakai dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang uraian hasil yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasannya yang meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan atas hasil pengelolaan data

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang uraian kesimpulan dan saran penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Di Jajaran Kantor Kemenag Kab. Banyumas. Hipotesis dalam pengujian ini dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Ada pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Di Jajaran Kantor Kemenag Kab. Banyumas secara parsial dengan nilai pengaruh yang positif dengan nilai koefisien regresi 0,344 dengan hasil tingkat signifikansi sebesar $0,011 <$ dari nilai $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan pengaruh yang sangat kuat.
2. Tidak ada pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Di Jajaran Kantor Kemenag Kab. Banyumas secara parsial dengan nilai pengaruh yang negatif dengan nilai koefisien regresi -0,033 dengan hasil tingkat signifikansi sebesar $0,754 >$ dari nilai $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak.
3. Ada pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Di Jajaran Kantor Kemenag Kab. Banyumas secara simultan dengan nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$ dan nilai F hitung $4,944 > F$ tabel 3,55, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_3 diterima.

B. Saran

Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya :

1. Bagi Satuan Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan perlu meningkatkan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan sehingga peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bagi akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk mengajar maupun penelitiannya dan untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel atau mengganti variabel dengan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Misalnya, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agoes, Sukrisno. 2003. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Anggota IKAPI. 2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung : Fokusmedia.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Isna, Alizar dan Wardo. 2013. *Analisis Data Kuantitatif Dengan IBM SPSS Statistics 20 : Sebuah Buku Panduan Praktis untuk Penelitian Sosial Dilengkapi Dengan Analisis Regresi Nominal dan Ordinal*. Purwokerto, STAIN Press.
- Mahsun, Mohamad. dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Manan, Abdul. 2000. *Membangun Islam Kaffah*. Yogyakarta : Medina Pustaka.
- Nasution, S. 2014. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rianse, Usman dan Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- Rudianto. 2008. *Pengantar Akuntansi : Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta : Erlangga.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs Lisrel : Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta : Salemba Empat.
- Setiawati, Farida Agus. 2017. *Statistika Terapan : Untuk Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta : Parama Publishing.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Sunyoto, Danang. 2010. *Uji Khi Kuadrat dan Regresi untuk Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suwiknyo, Dwi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syahatah, Husein. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah : Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Adryan, Martha. 2008. *Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan di BPRS Al Salaam*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Afrina, Dina. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Universitas Riau.
- Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol 24 No 1 Universitas Islam Riau.
- Aqla, Nur. dkk. 2016. *Pengaruh Perubahan Software Aplikasi, Penerapan Regulasi Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektifitas Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Kementerian Agama*

Provinsi Aceh). Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 5, No. 1.

Artana, Arlia Sari. 2016. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kiranayanti, Ida Ayu Enny dan Ni Made Adi Erawati. 2016. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Bali Vol. 16 No. 2.

Lubis, Mahmudah. 2018. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akruai, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara*. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Muhammad, Ridha. 2016. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akruai (Studi Empiris Pada Satker Di Jajaran Kanwil Kemenag Prov. Sumbar)*. Sumatera Barat : Universitas Andalas.

Nufus, Khayatun. 2015. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 3 No 2.

Rafid, Rashwan Zuhudy. 2016. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Bone)*. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin.

Rahmayani, Siti. 2018. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Rekonsiliasi Data Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Kementerian Agama Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi*. Medan : Universitas Sumatera Utara.

INTERNET

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah”, <http://www.djpk.depkeu.go.id>, diakses 31 Mei 2018 pukul 10.19.

“Bupati Banyumas : Penerapan SAP Akrual Perlu Keyakinan, Komitmen dan Kerja Tim”, <https://monitor.co.id>, diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.59.

“BPK RI, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*”, <https://www.bpk.go.id>, diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.29.

“Kementerian Agama Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan Tahun 2016”, <https://kemenag.go.id>, diakses Selasa 3 Juli 2018 pukul 10.59.

“Kemenag Banyumas Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan”, <https://jateng2.kemenag.go.id>, diakses Rabu 4 Juli 2018 pukul 10.10.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”, <http://www.bpkp.go.id>, diakses 31 Mei 2018 pukul 11.10.

“Laporan Data Pegawai Kementerian Agama”, <http://simpeg.go.id>, diakses Rabu 15 Agustus 2018 Pukul 11.01.

“Sejarah Kementerian Agama Kab. Banyumas”, <https://banyumas.kemenag.go.id>, diakses Rabu 4 Juli 2018 pukul 12.34.

“Visi dan Misi Kementerian Agama Kab. Banyumas”, <https://banyumas.kemenag.go.id>, diakses Rabu 4 Juli 2018 pukul 12.40.